Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi

Radar Bali

Bupati akan Rombak Pekerja PDNKK

SEMARAPURA - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta akhirnya memutuskan untuk melakukan perombakan besar-besaran untuk menyelamatkan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) Pemerintah Kabupaten Klungkung yang kini mengalami keterpurukan. Tidak hanya melakukan revitalisasi terhadap unit usaha PDNKK, Suwirta akan melakukan perombakan para pekerja yang selama ini berada di PDNKK.

"Sehingga kami akan segera memberikan dukungan untuk segera melakukan revitalisasi dan tentu nanti kegiatan usaha pun kami coba revitalisasi terkait dengan badan pengelola. Tidak hanya berpikir masalah ATK. Tenaga-tenaga juga harus kami revitalisasi karena tenaga yang cukup lama di sana. Mereka dibayar juga cukup tinggi," ungkap Bupati Suwirta, setelah menggelar rapat di kantor DPRD Klungkung, Selasa (17/7) kemarin.

Menurutnya, keputusan itu diambil karena keterpurukan PDNKK tidak terlepas dari kondisi sumber daya manusia (SDM) yang tidak bisa mengambil pelung-peluang yang ada. Ia pun sebenarnya mengaku cukup berat untuk memutuskan melakukan revitalisasi terhadap para pekerja di PDNKK, jika melihat rasa kemanusiaan. Namun hal itu menurutnya penting dilakukan untuk bisa membuat PDNKK bangkit dan berkembang. "Saya sebenarnya ewuh-pakewuh. Kalau kemarin dikeluarkan, kasihan. Sekarang ini harus lebih berani membongkar semua SDM-SDM yang tidak potensial lagi. Mungkin nanti kami akan carikan pekerjaan lain," ujarnya. "Dibandingkan kami menggaji mereka namun tidak memberikan produktivitas yang optimal. Tentu ini akan memakan ke dalam."

Terkait dengan pengunduran diri Direktur Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) Pemerintah Kabupaten Klungkung, I Wayan Sukadana, pihaknya mengaku akan segera mencari penggantinya. Diharapkan, direktur yang baru nanti memiliki visi dan misi yang lebih luas dan mempunyai keberanian untuk menangkap peluang yang ada di Kabupaten Klungkung. "Ada peluang-peluang yang bisa ditangkap. Misal kami sekarang memiliki City Tour yang bisa dikelola perusahaan daerah sehingga dinas tidak lagi bergerak untuk mengurusi pungutan," terang bupati asal Nusa Ceningan ini. **(ayu/yor)**

Edisi : Rabu, 18 Juli 2018

Hal. : 2

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

Kinerja PDNKK Klungkung Memburuk

Tunggak Gaji dan Premi BPJS Kesehatan Karyawan

SEMARAPURA – Kinerja Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) Pemkab Klungkung tidak kunjung membaik. Bahkan, cenderung memburuk. Ironisnya, sejak bulan April 2018 lalu hingga saat ini, gaji para pegawai belum terbayar. Begitu juga dengan premi BPJS Kesehatan para pegawai, telah menunggak sejak Januari 2018 lalu.

Direktur PDNKK Klungkung I Wayan Sukadana Minggu (15/7) kemarin menuturkan, sejak setahun terakhir ini PDNKK hanya melayani RSUD Klungkung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Dengan jumlah transaksi penjualan rata-rata mencapai Rp 30 juta – Rp 35 juta per bulan.

"Untuk pembelian karcis dan lainnya. Kami hanya mengandalkan cetak sekarang," kata Sukadana. Untuk diketahui, selain percetakan, usaha yang dikelola PDNKK ini terdiri dari usaha sarang burung walet dan alat tulis kantor (ATK). Namun pembayarannya, biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Bahkan, ada yang sampai enam bulan sekali.

Padahal, beban biaya PDNKK ini setiap bulan berkisar Rp 25 juta yang di antaranya untuk gaji karyawan yang mencapai Rp 16,7 juta. "Kalau mau bertahan, modal harus ada, material harus ada. Baru bisa hidup. Namun, sejak awal tidak ada suntikan dana, material tidak ada, order juga tersendat. Cash flow kami lambat karena SKPD itu kan pembayaran setiap tiga bulan, 4 bulan bahkan enam bulan," katanya.

Bahkan, PDNKK kini memiliki hutang sebesar Rp 180 juta dan piutang sebesar Rp 150 juta. Dia juga kerap menalangi gaji karyawan karena kondisi itu. "Karyawan kasbon ke saya bisa sampai Rp 30 juta. Belum termasuk saya tidak dapat gaji. Jumlah karyawan termasuk saya itu sebanyak 11 orang," bebernya. Mirisnya, premi BPJS Kesehatan karyarawan belum terbayar sejak Januari 2018 lalu.

"Rencananya minggu ini kami bayar karena ada uang dari pembayaran cetak karcis dari DPPKA," ujar pria asal Kecamatan Nusa Penida ini. Sukadana mengungkapkan, telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur PDNKK. Menurutnya, bukan karena kondisi perusahaan yang membuat dia memutuskan mundur, tapi karena ingin fokus ke keluarga dan bisnisnya di Nusa Penida.

"Untuk pengunduran diri secara lisan saya sudah beberapa kali mengajukan. Dan baru ini saya mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi," tandasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra saat dikonfirmasi membenarkan jika Sukadana telah mengundurkan diri surat pengunduran diri itu telah turun dari bupati untuk dilakukan kajian.

"Dan, sudah saya disposisi kepada asisten untuk secepatnya dilakukan kajian," tandasnya. **(ayu/mus)**

Edisi : Senin, 16 Juli 2018

Hal : 5

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi

Radar Bali

Delapan Dinas Dinilai Tak Teliti

Temuan BPK soal Penyusunan Laporan Anggaran

SINGARAJA – Delapan dinas di lingkup Pemkab Buleleng dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali tak teliti dalam menyusul laporan anggaran. Sehingga berpotensi menjadi masalah di kemudian hari kendati itu hanya menyangkut soal administrasi.

Delapan dinas itu adalah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2KBP3A) Buleleng, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng, dan Dinas Tenaga Kerja Buleleng. Empat instansi lainnya yakni Bagian Umum Sekretariat Daerah Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Buleleng, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Buleleng, serta Dinas Perikanan Buleleng. "Opininya sudah WTP. Catatan dari BPK RI juga sifatnya hanya administratif. Paling nanti kami sifatnya hanya konfirmasi terhadap eksekutif. Apakah catatan BPK RI itu sudah ditindaklanjuti apa belum," kata Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna usai membahas catatan temuan BPK belum lama ini.

Temuan BPK RI Perwakilan Bali itu dilampirkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap APBD Buleleng untuk tahun anggaran 2017. Lantaran hanya bersifat kesalahan administrasi, BPK pun meminta agar delapan dinas itu lebih teliti lagi dalam menyusun laporan anggaran. Contohnya dalam salah memasang pos laporan. Kegiatan belanja barang dan jasa yang semestinya dipasang pada belanja langsung, justru dipasang pada belanja tidak langsung. Sebut saja jasa foto copy serta pembelian kertas. Selain itu ada beberapa program kegiatan yang realisasinya masih dibawah 50 persen yang turut menjadi catatan. **(eps/gup)**

Edisi : Minggu, 15 Juli 2018

Hal. : 4

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi

Radar Bali

Bupati Artha Sorot Proyek Trotoar

NEGARA – Proyek pembangunan trotoar di Jalan Ratna, Kelurahan Baler Bale Agung, Jembrana menuai sorotan. Proyek yang termasuk penataan Kota Negara itu diminta agar memperhatikan kualitas serta keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Sorotan tersebut dilontarkan Bupati Jembrana I Putu Artha saat melakukan pengecekan proyek trotoar dan perbaikan saluran drainase bersama Sekkab Jembrana I Made Sudiada, serta Asisten I I Made Wisarjita.

Kepada pelaksana proyek sepanjang 850 meter di kedua sisi Jalan Ratna itu, Bupati I Putu Artha menekankan pentingnya kenyamanan pengguna jalan saat proyek pemerintah sedang dikerjakan. Mengingat Jalan Ratna merupakan jalur sibuk, penghubung Desa Kaliakah, Berangbang, serta Kelurahan Baler Bale Agung menuju kota. "Semestinya dikerjakan satu sisi dulu, baru dilanjutkan ke sisi berikutnya. Jangan diperbaiki bersamaan pada kedua sisi seperti ini. Kasihan masyarakat pengguna jalan jadi tambah macet," ujar Bupati Artha.

Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air Jembrana Widnyana mengatakan, proyek pembangunan trotoar itu merupakan kelanjutan penataan kota dengan nilai kontrak Rp 1,16 miliar. "Kita targetkan proyek ini bisa selesai empat bulan sesuai masa kerja proyek," pungkasnya. **(nom/mus)**

Edisi : Minggu, 15 Juli 2018

Hal. : 6

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi

Radar Bali

Desa Jangan Apriori Dengan BPK

Kades dan Sekdes Jembrana Evaluasi Siskeudes

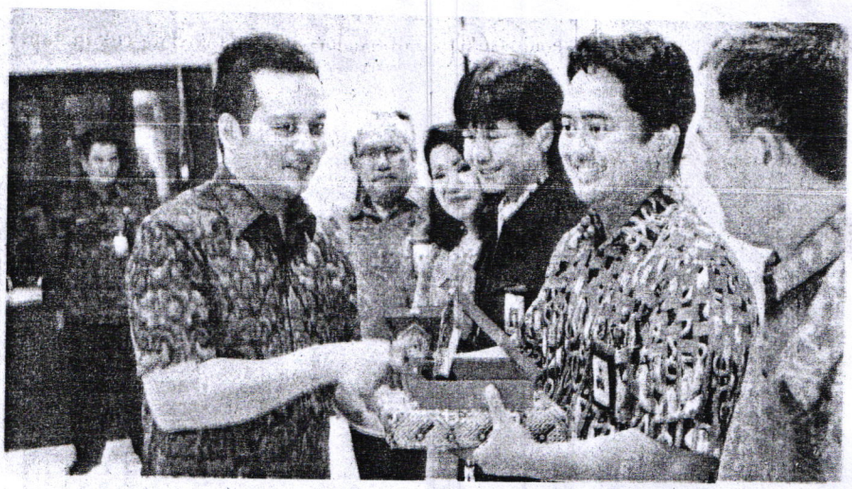

IST

CINDERAMATA: Wabup Kembang Hartawan (kiri) menyerahkan cinderamata kepada narasumber wokshop Siskeudes, kemarin.

NEGARA- Pemeriksaan keuangan yang dilakukan badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memang kadang membuat ketir-ketir. Namun tujuan pemeriksaan itu adalah untuk amannya pelaksanaan keuangan di daerah.

Wabup Jembrana I Made kembang Hartawan saat membuka workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Jumat (13/7) di Aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana mengatakan, dalam pengelolaan keuangan dana desa, Jembrana yang sempat mendapat pujian Presiden Joko Widodo harus dipertahankan.

Untuk mempertahankan keberhasilan tersebut tidak mudah karena perlu perhatian semua. "Untuk itu desa, janganlah apriori jika dibimbing oleh Inspektorat atau BPK. Jika kita diperiksa BPK ibaratnya sedang bepergian ke luar negeri. Kita diperiksa menyeluruh namun nantinya akan aman situasinya," ujarnya.

Dengan adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, maka desa diposisikan sebagai subjek pembangunan. Seluruh komponen desa mulai masyarakat dan perangkatnya memiliki peranan besar dalam pembangunan. "Pengelolaan dana desa tetap menjadi perhatian," ungkapnya.

Dengan sistem aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan

Edisi : Selasa, 14 Juli 2018

Hal. : 6

Radar Bali

Desa) dari BPKP yang digunakan dirasakan sangat membantu kita menyelesaikan administrasi di desa. Kembang meminta peserta yang merupakan Kepala Desa dan Sekdes se-Jembrana agar serius mendengarkan dan aktif bertanya jika menemukan permasalahan. "Jangan membuat acara dalam acara. Serius dalam mengikuti dan pergunakan kesempatan ini untuk memecahkan masalah yang ditemui di desa," ujarnya.

Sementara itu I Gusti Ngurah Satria Perwira, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali mengatakan, pujian dari Presiden dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Jembrana tentunya atas peran perangkat desa, secara tidak langsung. "Untuk mewujudkan itu membutuhkan dukungan dari berbagai komponen. Termasuk desa, dalam melaksanakan pembanguan dan pengeloaan keuangan," ungkapnya. **(nom/han)**

Edisi : Sabtu, 14 Juli 2018

Hal. : 6